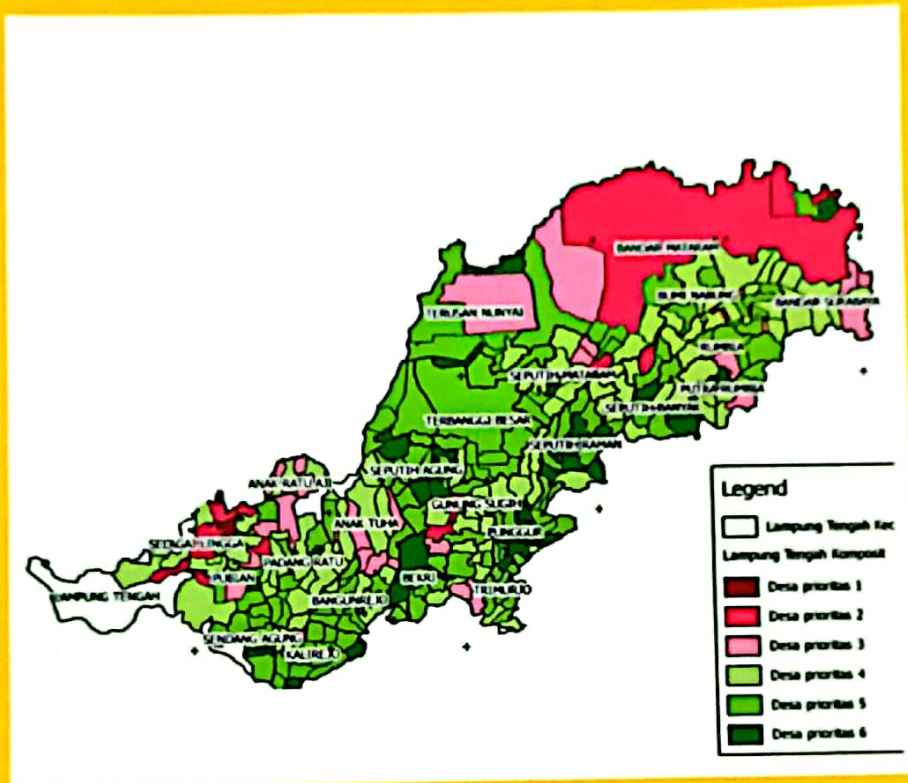




**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY
ATLAS (FSVA) KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
- 1.3. Metodologi

2 KETERSEDIAAN PANGAN

- 2.1. Lahan Pertanian
- 2.2. Produksi Pangan
- 2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

3 AKSES PANGAN

- 3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga
- 3.2. Akses Penghubung
- 3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan

4 PEMANFAATAN PANGAN

- 4.1. Akses Air Bersih
- 4.2. Akses Tenaga Kesehatan
- 4.3. Strategi Pemenuhan Pangan

5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

- 5.1. Kondisi Ketahanan Pangan
- 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan lahan pertanian terhadap jumlah penduduk kampung/desa; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan

tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1 ada 1 kampung/desa dari 314 kampung/desa di Kabupaten Lampung Tengah yang masuk pada prioritas 1 (0,32%) . Prioritas 2 dan 3 sebanyak 40 kampung/desa dari 314 kampung/desa (12,73 %) yang terdiri dari 14 kampung/desa (4,45 %) Prioritas 2; dan 26 kampung/desa (8,0 %) prioritas 3.
7. Kampung/desa prioritas 3 tersebar di : 3 kampung/desa di kecamatan Bumi Ratu Nuban; 1 kampung/Desa di kecamatan Seputih Surabaya; 6 Kampung/Desa di Kecamatan Anak Tuha, 2 kampung/desa di kecamatan Seputih Mataram; 1 kampung/Desa di kecamatan Terusan Nunyai, 3 kampung/desa di Kecamatan Pubian. 1 kampung/desa di Kecamatan Bandar Mataram, 1 kampung/desa di kecamatan Putra Rumbia, 1 kampung/desa di kecamatan Putra Rumbia, 3 kampung/desa di Kecamatan Bandar Surabaya, 1 kampung/desa di Kecamatan Gunung Sugih, 1 kampung/desa di Kecamatan Padang Ratu dan 2 kampung/desa di Kecamatan Anak Ratu Aji.

8. Karakteristik kampung/desa rentan pangan ditandai dengan (1) kecilnya rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk seluruhnya di kampung/desa, (2) tingginya jumlah penduduk miskin, dan (3) minimnya sumber air bersih terlindungi dibandingkan kepadatan jumlah penduduk pada kampung/desa tersebut.

9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan
 - d. Peningkatan produktivitas dan pengelolaan lahan pertanian serta komoditas pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan
 - e. Introduksi teknologi baru di bidang pertanian dan pangan serta peningkatan investasi dibidang pertanian dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan serta *zero waste* dan pelibatan pemberdayaan masyarakat lokal dan generasi muda di sektor pertanian.
 - f. Peningkatan investasi dan Pemberian modal usaha UMKM di pedesaan untuk penumbuhan usaha agribisnis di pedesaan serta meningkatkan lapangan kerja.
 - g. Pemanfaatan teknologi 4.0 sebagai upaya perluasan jaringan pemasaran produk pertanian dan pangan.



SAMBUTAN BUPATI

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, saya menyambut gembira atas publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. Adanya publikasi FSVA ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, instansi terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama sama melakukan intervensi melalui program/kegiatan dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan, serta penanganan daerah rawan/rentan pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Tengah.

Saya sangat mengapresiasi penyusunan Peta FSVA ini yang telah memetakan kondisi ketahanan pangan sampai dengan tingkat kampung/kelurahan sehingga dapat memaksimalkan upaya dan program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Program dan upaya tersebut meliputi optimalisasi sumberdaya pangan yang ada di masing-masing wilayah kampung/kelurahan sehingga dapat menurunkan tingkat kerawanan pangan di wilayahnya. Selanjutnya diharapkan peta ini dapat menjadi bagian dari system peringatan dini (*early warning system*) dan bahan informasi penting dan rekomendasi pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan (dalam arti luas) bagi semua pihak (*stakeholder*), baik instansi pemerintah, swasta, BUMN dan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan rentan rawan pangan dan gizi dapat diantisipasi dan tidak berdampak buruk.

Akhirnya saya menyampaikan ucapan dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Peta FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

GUNUNG SUGIH, 28 November 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan dan 314 kampung/desa dengan total penduduk sebesar 1.447.395 jiwa (BPS). Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah seluas 4.789,82 Km² (BPS, 2015), yang terdiri dari 28 kecamatan,

291 Kampung dan 10 kelurahan. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57% dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 1.055,28 Km² dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 65,14 Km².

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104⁰ 35' Bujur Timur – 105⁰50' Bujur Timur dan 4⁰ 30'' Lintang Selatan - 4⁰ 15' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Lampung Tengah terletak ditengah-tengah Provinsi Lampung, dengan batas - batas:

- a. **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
- b. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.

- c. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- d. **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu : (a) Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl, (b) Daerah Topografi Berombak sampai bergelombang yaitu terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300 m -500 mdpl, (c) Daerah Dataran Aluvial, merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m – 75 m dpl dengan kemiringan 0% -3%, (d) Daerah Rawa Pasang Surut, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl, (e) Daerah River Basin yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selanggai Lingga. Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita dan laju inflasi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi. Berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah menurut pendapatan persektor usaha mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar Rp 47.937.700

juta. PDRB untuk Tahun 2022 belum dapat dihitung, penghitungan PDRB dapat dilakukan pada saat akhir tahun.

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Atas dasar harga konstan maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 sebesar 5,26 %, sementara pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan yaitu pada (-1,67). PDRB mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pertumbuhan dikarenakan terdampak oleh kondisi Pandemi Covid 19. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Tingkat inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 secara umum sebesar 3,44%.

Inflasi di Kabupaten Lampung Tengah mengalami fluktuasi dalam pertumbuhannya. Hal ini berpengaruh pada adanya perubahan harga-harga barang/jasa yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun demikian, peningkatan inflasi pada tahun 2021 masih dapat diatasi dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga harga barang dan daya beli masyarakat dapat terkendali dengan baik. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat

dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap tahunnya. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp 41.617,57.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

- a. Tingkat kemiskinan, pembangunan kesehatan dan pembangunan manusia, kedua aspek ini sering digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah persentase penduduk miskin yang diperoleh dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurut data BPS dalam Lampung Tengah Dalam Angka (2021), Kabupaten Lampung Tengah memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 11,82 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 menurun dibandingkan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 12,03 persen.
- b. Untuk bidang kesehatan, masih kurangnya jumlah Puskesmas dan Posyandu Kabupaten Lampung Tengah. Kurangnya rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk terutama di beberapa kecamatan serta masih tingginya angka stunting dan terjadinya kasus gizi buruk.
- c. Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah tingkat SMA/SMK/ sederajat hanya mencapai 52,30 persen.
- d. Kurangnya investasi dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di daerah yang dapat dilihat dari masih rendahnya angka partisipasi sekolah, masih tingginya persentase stunting pada anak balita serta kurangnya dukungan sarana prasarana akibat kurangnya kualitas

dan pemeliharaan infrastruktur ditambah dengan kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur dipandang sebagai hambatan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang diharapkan.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi masalah dalam proses pembangunan dan upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi sangat penting untuk mengetahui siapa, berapa banyak, dimana mereka berada dan mengapa rumah tangga rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)* untuk memperkuat analisis ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi yang berfungsi sebagai instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah. Penyusunan peta ketahanan pangan dan gizi ini digunakan untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran, menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2009, Peta FIA 2005 dimutakhirkan dan diubah menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan – *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Hasil dari FSVA 2010 memberikan kontribusi langsung terhadap perubahan kebijakan penting termasuk integrasi kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan dan gizi ke dalam rencana tahunan dan alokasi anggaran tahunan pemerintah. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dimana tingkat analisisnya sampai dengan desa, bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan

dalam *targeting* dan efektifitas penanganan kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis FSVA menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastuktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Untuk mengakomodasikan perubahan perkembangan situasi ketahanan pangan dan menangkap kemajuan hasil pembangunan ketahanan pangan selama 2020 - 2021, maka pada tahun 2022 ini dilaksanakan pemutakhiran (*updating*) data FSVA Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dihasilkan peta yang lebih baru, yaitu Peta FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. FSVA Kabupaten Lampung Tengah mencakup 28 kecamatan dan 314 kampung/desa. Pada FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022, pembahasan masalah gizi diperluas analisisnya untuk menekankan pentingnya penanganan kerentanan pangan dan gizi oleh Pemerintah Indonesia. FSVA Kabupaten Lampung Tengah 2022 ini merupakan produk masalah gizi seiring dengan diluncurkannya gerakan *Scaling - Up Nutrition* secara resmi dari partisipasi aktif dari dinas/badan/unit kerja SKPD terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*). Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis

sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2017 dan dimutakhirkan pada setiap tahun. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan sampai dengan tingkat desa terutama pasca pandemi Covid - 19 selama dua tahun terakhir ini maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa. Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

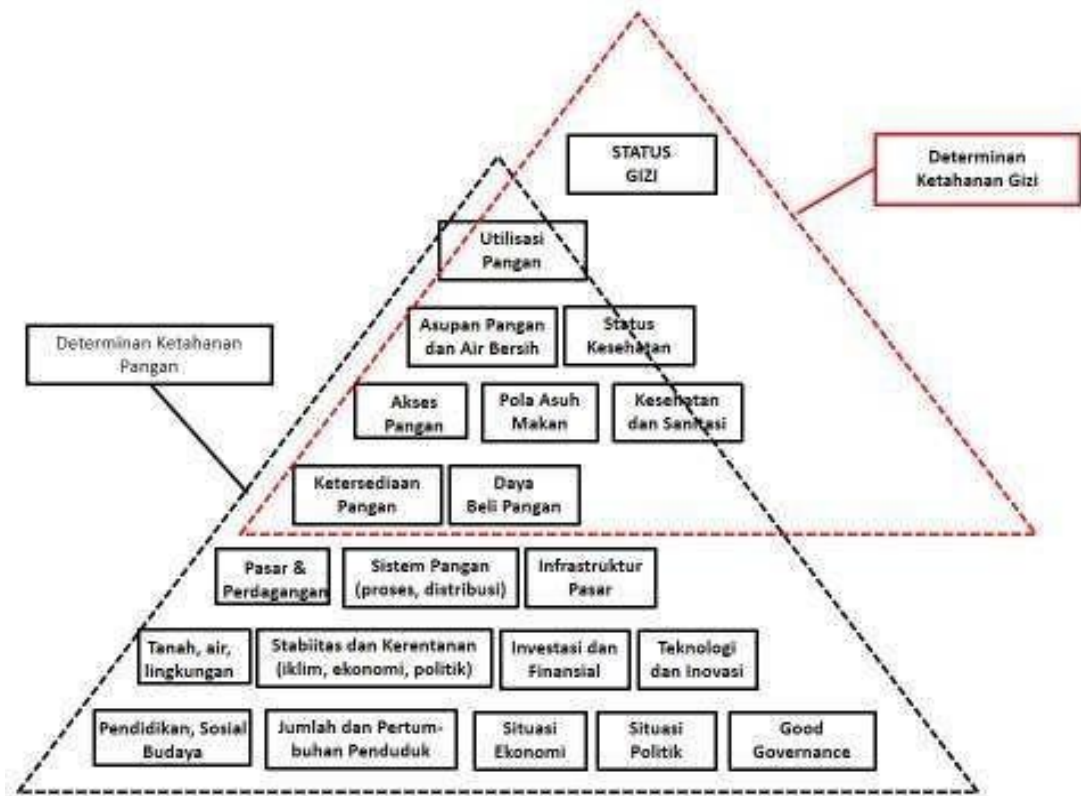
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang

menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah

United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan *higiene* yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New Yor

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas. Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu,

rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien.

Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa. Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat 6 (enam) indikator yang digunakan dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas baku lahan pertanian dibandingkan jumlah penduduk	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2021
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan(pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Sensus Penduduk (SP) 2021
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah Penduduk Desa dari SP 2021
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah penduduk Tahun 2021

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global*

Hunger Index (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana
 Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
 a_i : Bobot masing-masing indikator
 X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$KID = \sum_{i=1}^6 a_i c_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Kj : *cut off point* komposit ke-J

ai : Bobot indikator ke-i

Cij : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan

¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

pangan per penduduk suatu wilayah juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 314 kampung di Kabupaten Lampung Tengah, 1 kampung/desa masuk dalam prioritas 2 (0,63 %), 0 kampung/desa masuk dalam prioritas 2 (0 %) dan 2 kampung/desa prioritas 3 (0,63 %). Total kampung/desa yang masuk pada rasio 1-3 untuk rasio luas lahan pertanian per penduduk yaitu sebanyak 4 (1,27 %) kampung/desa dari 314 kampung/desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan yang memiliki rasio lahan pertanian per penduduk prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berada di Kecamatan :

- a. Kecamatan Seputih Raman pada Kampung Rama Dewa (prioritas 1)
- b. Kecamatan Bandar Mataram yaitu pada kampung UPT Way Terusan SP 1 (prioritas 1)
- c. Kecamatan Bandar Mataram yaitu pada kampung UPT Way Terusan SP3 (prioritas 3)
- d. Kecamatan Terbanggi Besar pada Kampung Karang Endah (prioritas 3)

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Jumlah Kampung/Desa	Persentase
1	2	0,63 %
2	0	0 %
3	2	0,63 %
4	1	0,31 %
5	79	25,16 %
6	230	73,25 %

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 35,53% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Padi, jagung dan singkong merupakan bahan makanan pokok di Kabupaten Lampung Tengah yang menyumbang hampir 98 persen dari total produksi sereal kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2, produksi umbi-umbian di Kabupaten Lampung Tengah umumnya mengalami peningkatan sejak tahun 2002, meskipun pada periode Tahun 2017-2019 terjadi fluktuasi produksi yang disebabkan beberapa hal antara lain : berkurangnya luas lahan produksi pertanian, turunnya produktivitas dan terjadinya perubahan/fluaktuasi musim yang mempengaruhi pola tanam dan panen.

Tabel 2.2 Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Sereal	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 tahun
Padi	906,04	812,77	831,73	906,05	920	864,135
Jagung	300,54	308,00	52,13	69,84	359,5	218,007
Ubi Kayu	2.243,8	1572,1	1.330,3	1.572,1	1.500,6	1.643,83
Ubi Jalar	7.262	4.061	1.360	4.820	1.134	3.727

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2014-2018, BPS

Tahun 2019, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 359.506 ton jagung, 1.500.624 ton ubi kayu, dan ubi jalar 1.134 ton.

Tabel 2.3 Produksi Total Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

Kecamatan	Total Serealia			
	Padi	Jagung	Ubi Jalar	Ubi Kayu
1. Padang Ratu	-	7.492	0	23.172
2. Selagai Lingga	-	10.356	0	1.794
3. Pubian	-	23.454	0	5.031
4. Anak Tuha	-	13.263	0	93.497
5. Anak Ratu Aji	-	11.477	176	42.587
6. Kalirejo	-	17.788	151	4.826
7. Sendang Agung	-	2.023	0	550
8. Bangunrejo	-	14.907	22	2.157
9. Gunung Sugih	-	25.772	0	36.501
10. Bekri	-	3.302	0	6.921
11. Bumi Ratu Nuban	-	1.709	0	1.667
12. Trimurjo	-	1.088	156	506
13. Punggur	-	3.296	57	399
14. Kota Gajah	-	1.491	0	0
15. Seputih Raman	-	11.900	133	6.590
16. Terbanggi Besar	-	10.304	0	211.871
17. Seputih Agung	-	30.024	48	263.738
18. Way Pengubuan	-	8.973	0	54.906
19. Terusan Nunyai	-	1.942	0	123.362
20. Seputih Mataram	-	30.771	48	81.448
21. Bandar Mataram	-	36.102	0	67.177
22. Seputih Banyak	-	10.917	0	57.812
23. Way Seputih	-	7.783	0	50.124
24. Rumbia	-	36.727	0	65.589
25. Bumi Nabung	-	7.639	221	64.574
26. Putra Rumbia	-	16.123	0	32.880
27. Seputih Surabaya	-	7.107	0	100.053
28. Bandar Surabaya	-	5.775	121	100.890
Jumlah	-	339.506	1.134	1.500.624

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap

jumlah rumah tangga di kampung/desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 314 kampung/desa di Kabupaten Lampung Tengah, 22 kampung/desa masuk dalam prioritas 1 (7 %), 26 kampung/desa prioritas 2 (8,28 %) dan 71 kampung/desa prioritas 3 (2 %).

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Jumlah Kampung	Persentase
1	1	22	7 %
2	2	26	8,28 %
3	3	71	22,61 %
4	4	82	26,11 %
5	5	52	16,56 %
6	6	61	19,42 %

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2010-2021 mencapai 1,6 % per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 0,4 % dan 1,3 %, ditambah dengan variasi produksi yang fluktuatif antar tahun. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 0,25 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,14 Sementara itu laju konversi lahan sebesar 0,83 Ha/tahun. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 49,68 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Pada tahun 2022 evaluasi pembangunan termasuk pembangunan ketahanan pangan akibat dampak dari Pandemi Covid 19 harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta visi dan misi

pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dalam cakupan pembangunan ketahanan pangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2025 yaitu :

1. Mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara selaras dan serasi
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Ketiga misi dan visi di atas terkait cakupan penyelenggaraan program ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan Strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan serta pelayanan transportasi dengan tujuan meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu
- b. Menurunkan luas kawasan kumuh
- c. Meningkatkan aksesabilitas masyarakat terhadap air bersih melalui program penyediaan air baku dan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- d. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif melalui strategi meningkatkan produksi komoditas pertanian dan hortikultura yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
- e. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan di masyarakat.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2022 - 2025 bertujuan untuk (i) memperkuat penyediaan pangan yang

beragam berbasis sumber daya lokal; (ii) menurunkan jumlah penduduk rawan pangan ; (iii) memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok; (iv) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (v) meningkatkan keamanan pangan segar. Strategi untuk peningkatan produktivitas

(i) Perbaikan sarana prasarana pertanian

- a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
- b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
- c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
- d. Pengelolaan air
- e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

(ii) Perluasan lahan sawah

- a. Pengembangan lahan sawah
- b. Optimalisasi penggunaan lahan
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung

(iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- c. Perbaikan dan pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan melalui pembangunan lumbung dan perbaikan jaringan irigasi

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani

- a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan bagi Gapoktan, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani
- b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
- d. Pemasaran produk pertanian
- e. Penguatan stok atau cadangan pangan daerah melalui Lumbung Pangan Masyarakat, dll.
- f. Pemberdayaan masyarakat, kelompok tani dan kelompok wanita tani Pengembangan korporasi usaha, dan penumbuhan kawasan mandiri pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan.

- a. Menumbuhkan sentra – sentra pembangunan ekonomi lokal yang selaras dengan tuntutan kemandirian pangan ke arah ekonomi biru (sumber investasi baru), perekonomian agromaritim di pedesaan, dimana desa sebagai pusat pertumbuhan baru.
- b. Pelibatan BUMDES dan penyertaan modal melalui Anggaran Dana Desa (ADD) untuk membina dan mengelola usaha – usaha di bidang pangan/pertanian sehingga membuka lapangan pekerjaan di pedesaan dengan memperhatikan pasar dan kebutuhan/demand konsumen terhadap produk-produk pangan/pertanian yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Menumbuhkan investasi dan peran swasta yang melibatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat pada sektor hulu terkait perbaikan varietas dan komoditas pangan yang sesuai dengan kondisi iklim dan geografi lokal Lampung Tengah.

- d. Manajemen dan pengelolaan limbah usaha pertanian dan pangan melalui pemberdayaan peran masyarakat sehingga tercapai pengelolaan *zero waste* di Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Penanganan secara lintas sektor pada desa-desa/kampung yang berada pada prioritas 2 – 3 daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Pelibatan peran swasta yang bergerak di sektor pertanian (dalam arti luas, peternakan, perkebunan dan perikanan) dalam kegiatan CSR/Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) dalam penanganan daerah rentan rawan pangan dan lokus stunting.

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, persentase penduduk pada garis kemiskinan selama tahun 2016-2021 mengalami penurunan namun masih fluktuatif. Penurunan garis kemiskinan signifikan terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan berhasilnya program-program Pusat yang langsung diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi melalui kegiatan padat karya, pemberdayaan masyarakat dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Persentase garis kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Persentase Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah	13,28	12,90	12,62	12.03	11,82

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2021, terdapat 310 kampung/desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah (Prioritas 1). Sebanyak 3 desa (0,95%) masuk prioritas 2, dan 1 kampung/desa (0,32%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 310 kampung/desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	310	98,72 %
2	3	0,95 %
3	1	0,32 %
4	0	0 %
5	0	0 %
6	0	0 %

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, BPS, di Kabupaten Lampung Tengah, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Seputih Banyak, Seputih Surabaya dan Putra Rumbia).

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 - 2025 diantaranya:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia
- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir serta daerah /kampung-kampung pada perbatasan wilayah.

- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan pedesaan.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM serta pasar pasar rakyat di kampung/pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi 4.0 secara bijak untuk memperluas sumber informasi, keterjangkauan pasar, peningkatan lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan.
- Memanfaatkan jaringan Tol Trans Sumatera Sebagai jaringan akses distribusi pangan dan sumber pasar baru untuk produk – produk lokal UMKM yang akan dipasarkan pada rest area sepanjang Tol Trans Sumatera yang melewati wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	19	6,05 %
2	55	17,51 %
3	67	21,33 %
4	75	23,88 %
5	49	15,60 %
6	49	15,60 %

¹ Permenkes 416 Tahun 1990

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan pengetahuan atas pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 3.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	35	11,14 %
2	53	16,87 %
3	50	15,92 %
4	73	23,24 %
5	54	17,19 %
6	49	15,60 %

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kabupaten Lampung Tengah, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi

intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisiasi menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6 - 24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan), terutama yang sangat mendesak adalah ketersediaan sumber air bersih yang terlindungi terutama pada daerah – daerah rentan rawan pangan.
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

4. Menjaga asupan dan kondisi gizi yang cukup pada anak-anak usia balita (anak-anak PAUD) melalui program intervensi daerah rentan rawan

pangan dengan program pemberian makanan tambahan anak sekolah PAUD (PMT-AS PAUD).

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 314 desa/kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah maka didapatkan 0 kampung/desa (Prioritas 1), 5 kampung/desa (Prioritas 2), 26 kampung/desa (Prioritas 3), 100 kampung/desa (Prioritas 4), 131 kampung/desa (Prioritas 5) dan 52 kampung/desa (Prioritas 6). Sebaran jumlah kampung/desa berdasarkan prioritas analisis komposit dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0,32 %
2	14	4,46 %
3	26	8,28 %
4	111	31,84 %
5	131	41,71 %
6	31	16,56 %

Kampung/Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat pada Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga. Untuk kampung/desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di beberapa wilayah Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Kampung/Desa Prioritas 2 berdasarkan Analisis FSVA Tahun 2022

No	Kecamatan	Kampung
1.	Bandar Mataram	UPT Way Terusan SP 3
2.	Bandar Mataram	Mataram Udik
3.	Bumi Nabung	Sri Kencono Baru
4.	Selagai Lingga	Galih Karangjati
5.	Selagai Lingga	Gedung Harta
6.	Selagai Lingga	Negeri Agung
7.	Selagai Lingga	Negeri Jaya
8.	Seputih Mataram	Subing Karya
9.	Pubian	Tawang Negeri
10.	Pubian	Pekandangan
11.	Pubian	Negeri Ratu
12.	Rumbia	Teluk Dalem Ilir
13.	Kalirejo	Sinar Rejo
14.	Gunung Sugih	Komering Agung

Kampung/Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Kampung/Desa Prioritas 3 berdasarkan Analisis FSVA Tahun 2022

No	Kecamatan	Kampung
1.	Bumi Ratu Nuban	Sukajadi
2.	Bumi Ratu Nuban	Sidokerto
3.	Bumi Ratu Nuban	Sukajawa
4.	Seputih Surabaya	Gaya Baru Delapan
5.	Anak Tuha	Negara Aji Tua
6.	Anak Tuha	Haji Pemanggilan
7.	Anak Tuha	Bumi Jaya
8.	Anak Tuha	Gunung Agung
9.	Anak Tuha	Sri Katon
10.	Anak Tuha	Jaya Sakti
11.	Seputih Mataram	Bumi Setia Mataram
12.	Seputih Mataram	Banjar Agung Mataram
13.	Pubian	Payung Makmur
14.	Pubian	Riau Priangan
15.	Pubian	Negeri Kepayungan
16.	Rumbia	Bina Karya Putra
17.	Bandar Mataram	Terbanggi Ilir
18.	Terusan Nunyai	Gunung Batin Baru
19.	Putra Rumbia	Rantau Jaya Ilir
20.	Bandar Surabaya	Sumber Agung
21.	Bandar Surabaya	Cempaka Putih
22.	Bandar Surabaya	Cabang
23.	Gunung Sugih	Wono Sari
24.	Padang Ratu	Padang Ratu
25.	Anak Ratu Aji	Bandar Putih Tua
26.	Anak Ratu Aji	Sukajaya

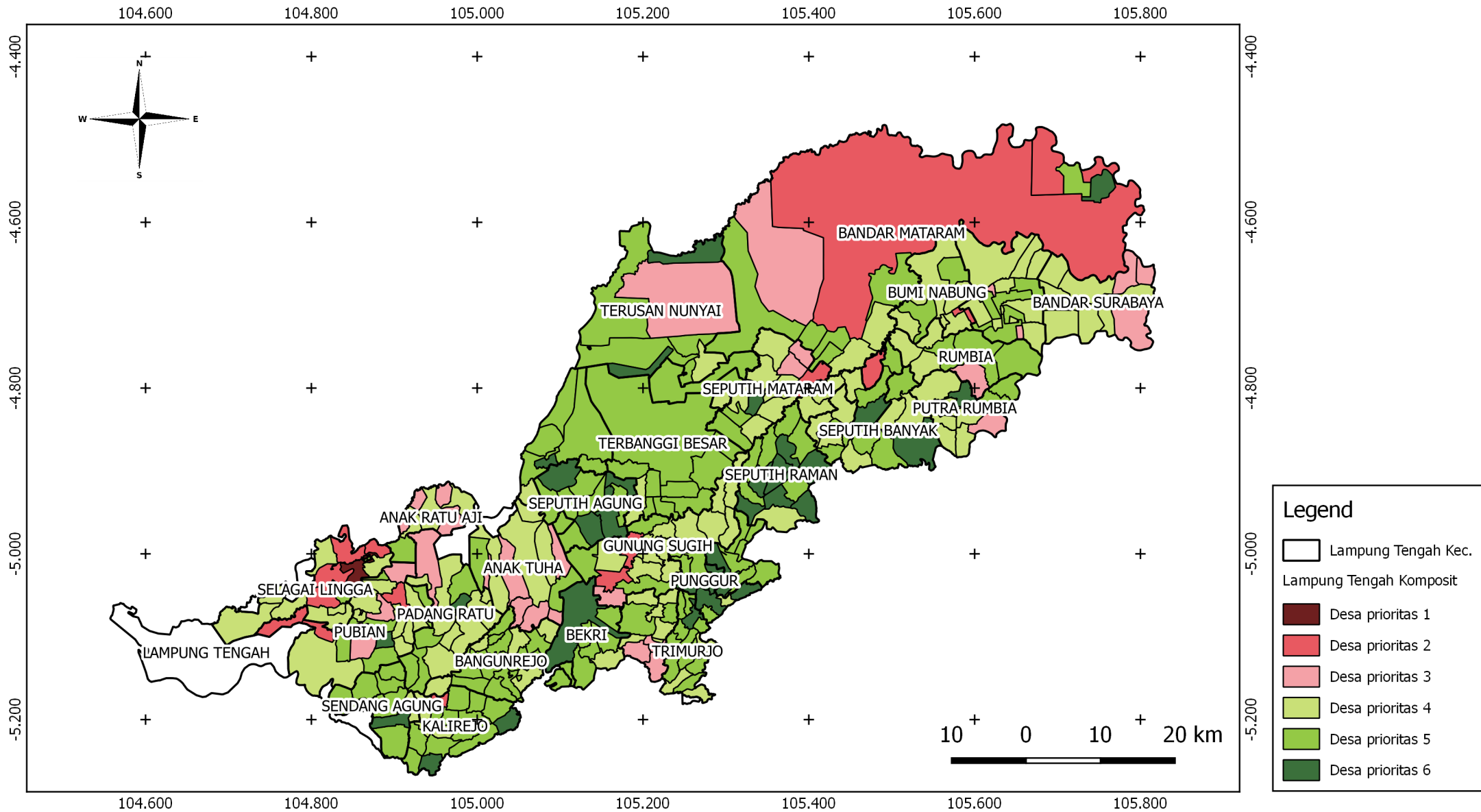
5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kampung/Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1)) kecilnya rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, (2) tingginya rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk seluruh wilayah kampung, dan (3) minimnya rasio tenaga kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk kampung/desa.

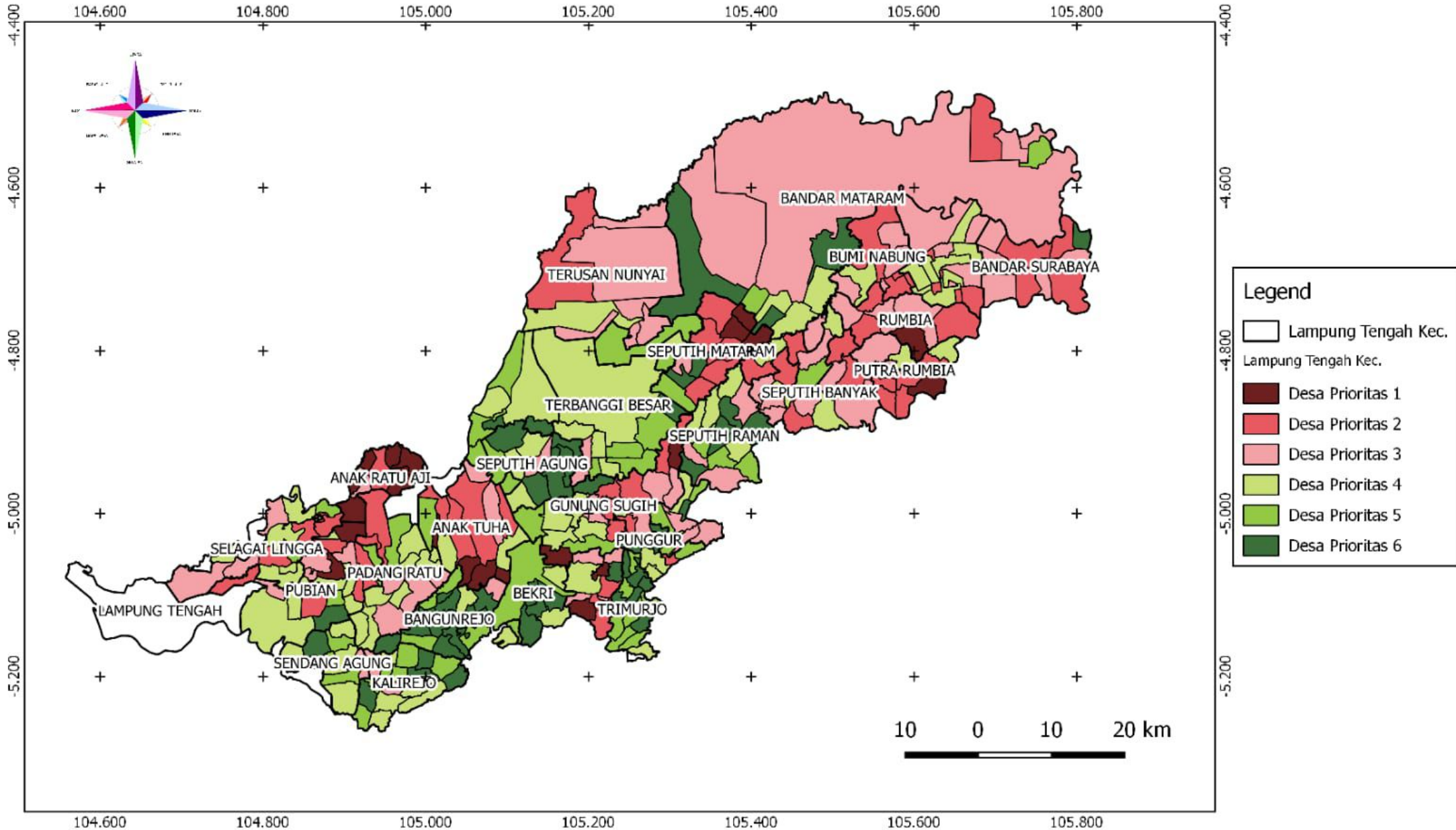
Kampung/Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) kecilnya rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, (2) tingginya rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk seluruh wilayah kampung, dan (3) kurangnya akses terhadap air bersih yang terlindungi.



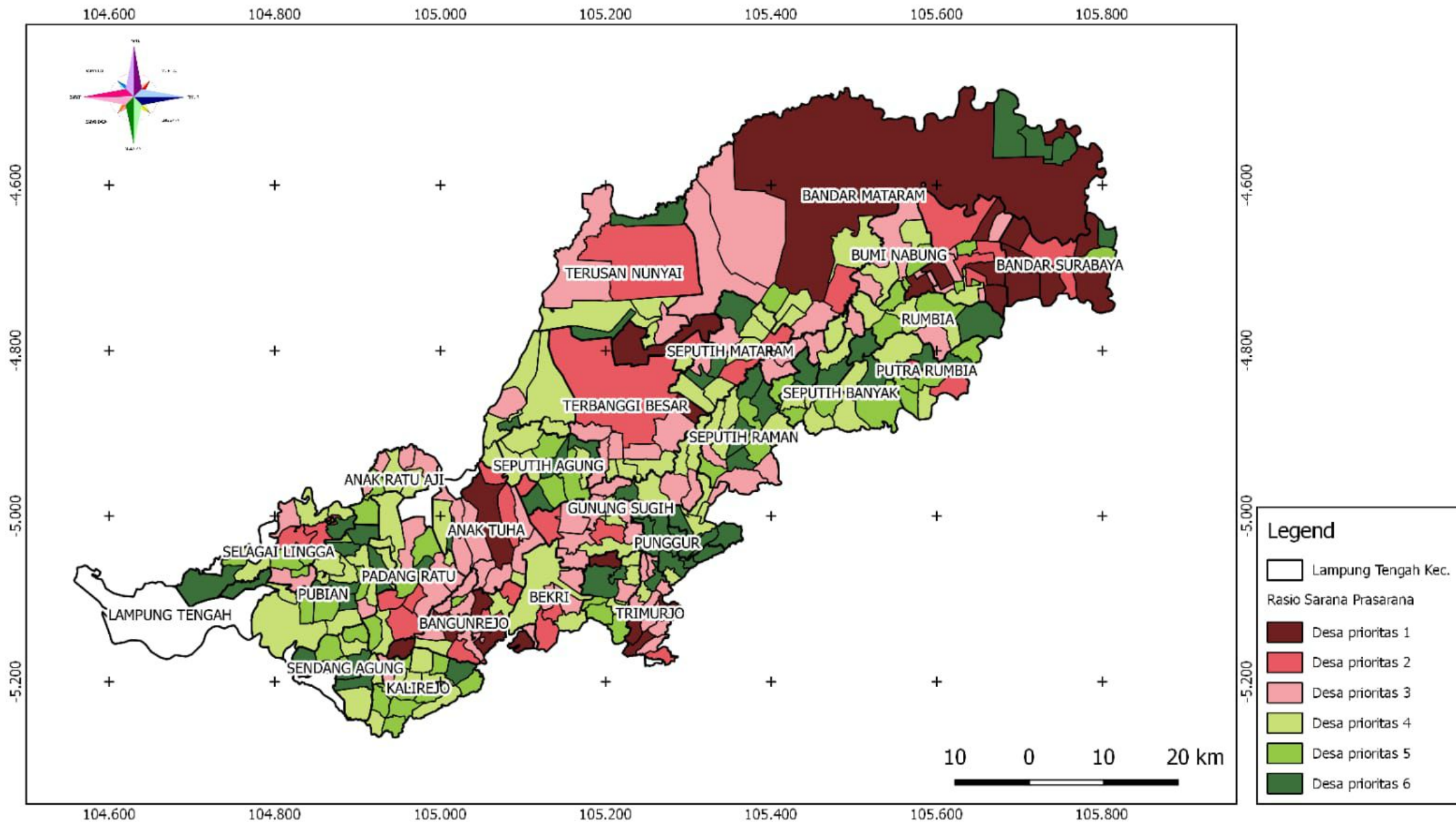
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022



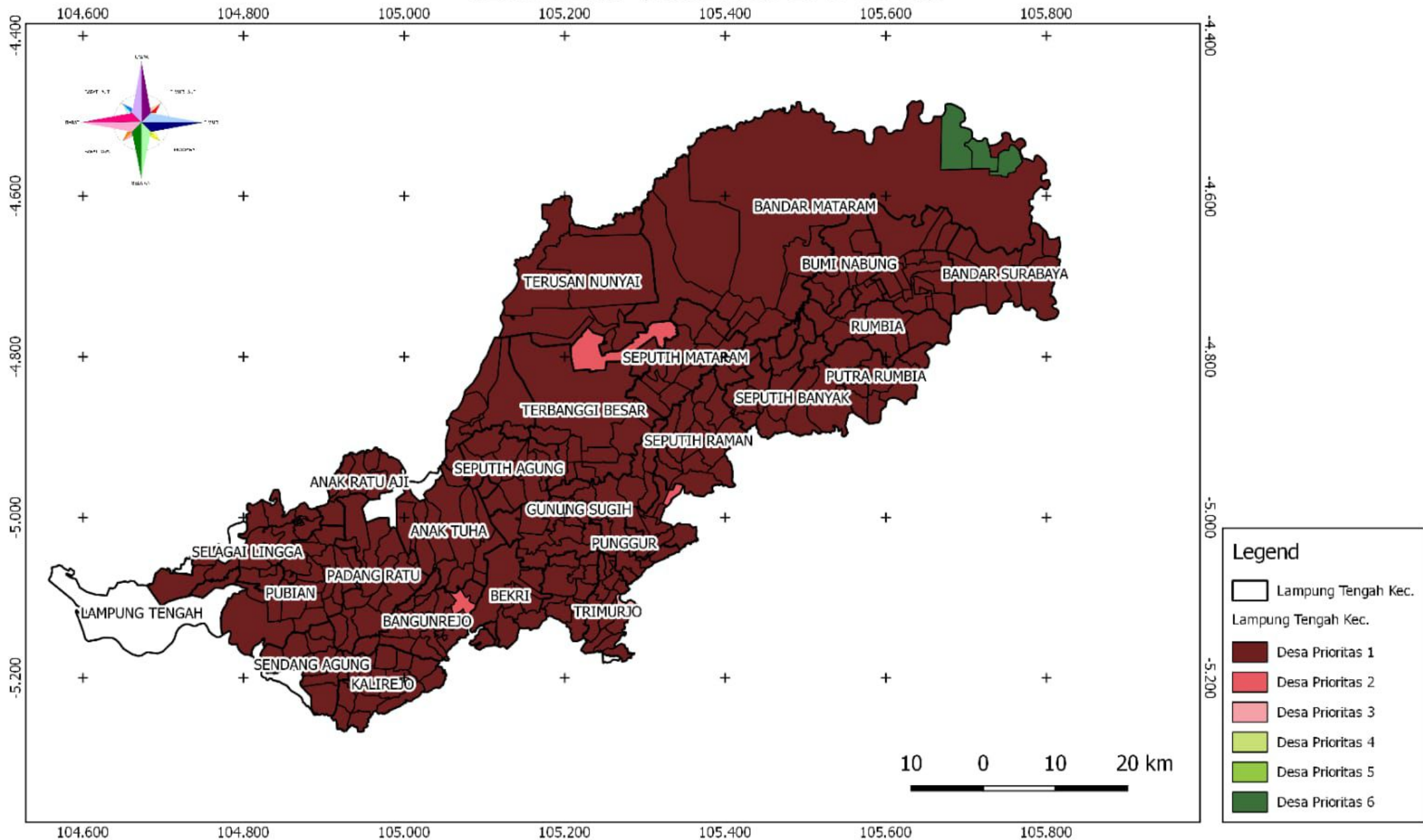
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP MUMLAH RUMAH TANGGA



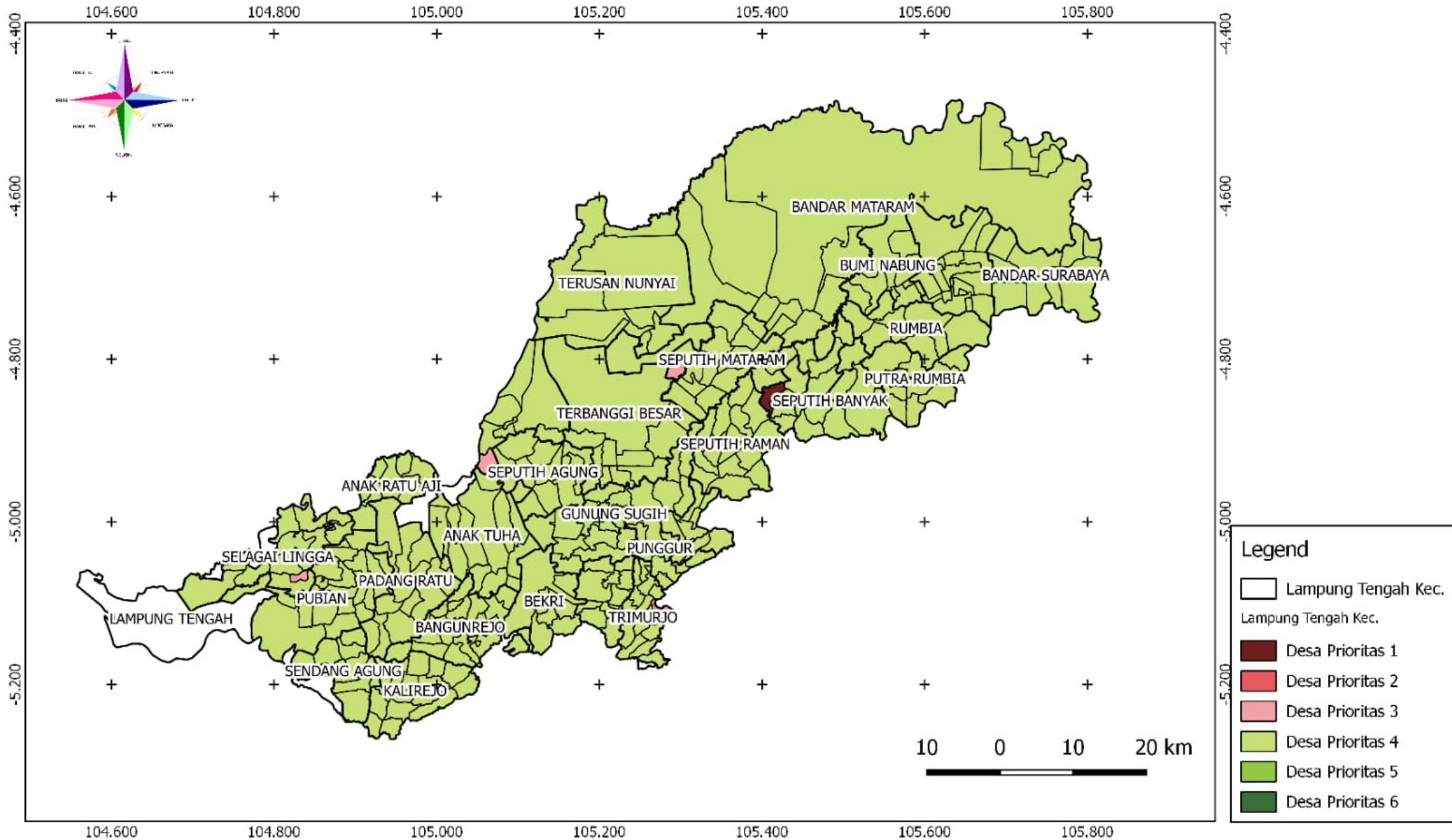
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 RASIO SARANA PRASARANA TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA



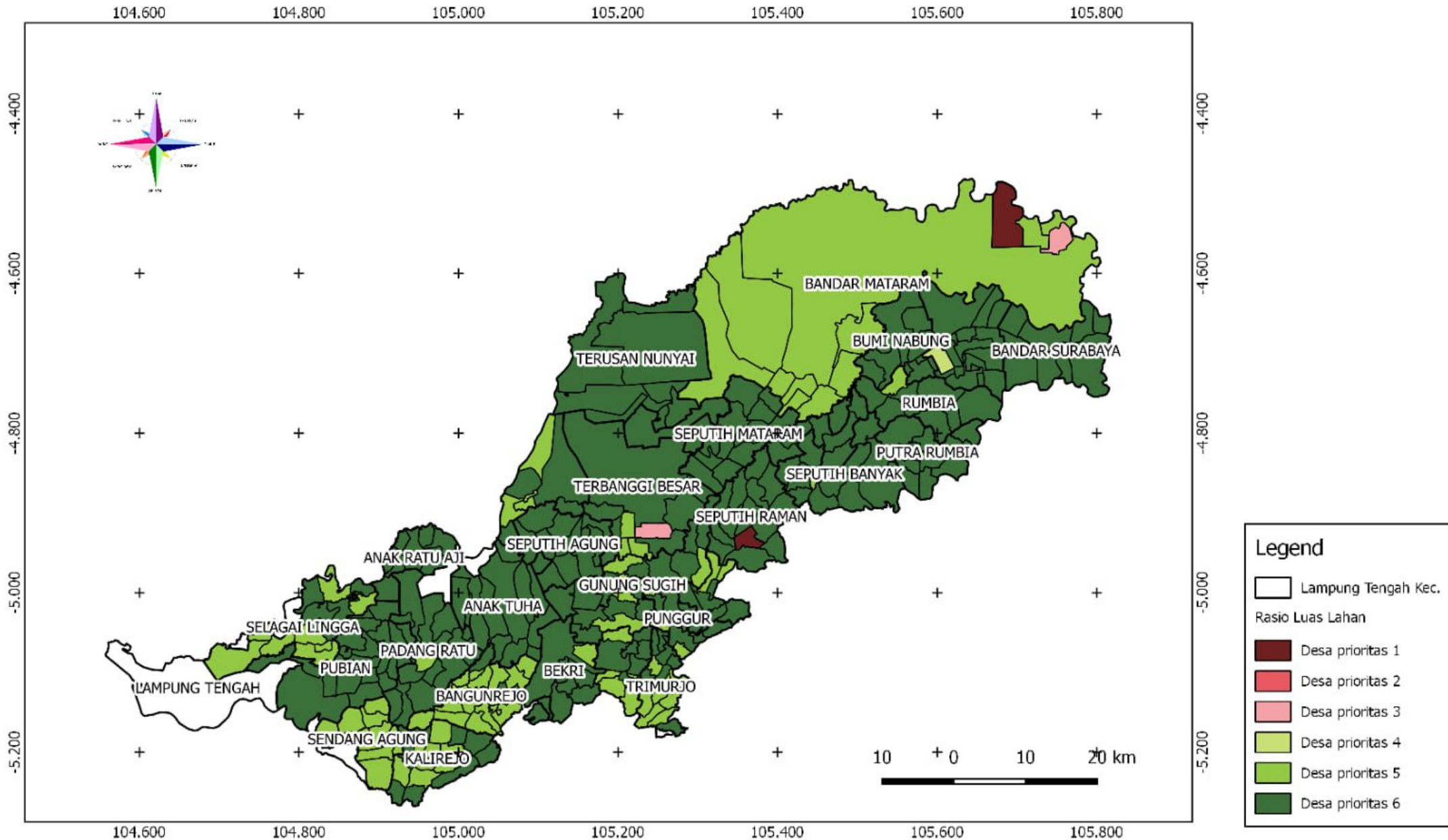
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 RASIO JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 DESA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI MELALUI DARAT, AIR, ATAU UDARA



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 RASIO JUMLAH TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

